

DETERMINANTS OF CAPITAL EXPENDITURE IN PROMOTING SUSTAINABLE REGIONAL GROWTH IN THE REGENCIES AND MUNICIPALITIES OF CENTRAL JAVA PROVINCE

DETERMINAN BELANJA MODAL DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN DAERAH KOTA/KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH YANG BERKELANJUTAN

Mohamad Zulman Hakim¹, Dewi Rachmania², Zidan Muhammad Faizal³, Raisa Khairurrizki⁴, Khoirul Huda⁵

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*mohamadzulmanhakim@gmail.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) on the Capital Expenditure of local governments in Central Java Province. Capital expenditure refers to government spending allocated for acquiring fixed assets or other assets that provide long-term benefits in supporting public service delivery and regional development. The study was conducted on 35 local governments, consisting of 29 regencies and 6 municipalities in Central Java Province, during the 2019-2023 period. The sampling technique employed was purposive sampling, in which samples were selected based on specific criteria aligned with the research objectives. The data used were secondary data obtained from the Budget Realization Reports (LRA) of local governments. Data analysis was carried out using EViews 12 through descriptive statistical analysis, classical assumption tests, panel data regression analysis, and hypothesis testing using the t-test. The results indicate that Regional Original Revenue (PAD) has a positive and significant effect on Capital Expenditure, suggesting that an increase in regional fiscal capacity can encourage greater local government investment through capital expenditure. The Revenue Sharing Fund (DBH) has a negative and significant effect on Capital Expenditure, while the General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) do not have a significant effect on Capital Expenditure in regency and municipal governments in Central Java Province during the study period.

Keywords: *Capital Expenditure, Revenue Sharing Fund (DBH), Special Allocation Fund (DAK), General Allocation Fund (DAU), and Regional Original Revenue (PAD).*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Penelitian ini dilakukan pada 35 pemerintah daerah yang terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah. Analisis data dilakukan menggunakan EViews 12 melalui analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, serta pengujian hipotesis menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kemampuan fiskal daerah mampu mendorong peningkatan investasi pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. PENDAHULUAN

Belanja modal merupakan bagian krusial dalam pengelolaan keuangan daerah karena berfungsi sebagai bentuk investasi pemerintah untuk mendukung pembangunan jangka panjang. Penggunaan belanja ini diarahkan untuk pengadaan aset tetap seperti infrastruktur, bangunan, serta perlengkapan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Seperti dijelaskan oleh Putri dan Mauliyah (2022), belanja modal mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan publik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kerangka teori desentralisasi fiskal oleh Oates (1972), belanja modal juga dipandang sebagai indikator utama dalam mengevaluasi seberapa efektif daerah dalam mengalokasikan sumber daya melalui kemandirian fiskal.

Tabel 1
Fenomena trend naik belanja modal provinsi jawa tengah periode 2019-2023

Kabupaten/Kota	Tahun	Y
Kabupaten Banjarnegara	2019	Rp 22,291,500.00
	2020	Rp 24,562,000.00
	2021	Rp 28,956,000.00
	2022	Rp 34,521,000.00
	2023	Rp 37,895,600.00
Kabupaten Banyumas	2019	Rp 37,252,713.00
	2020	Rp 38,690,000.00
	2021	Rp 42,150,000.00
	2022	Rp 47,852,000.00
	2023	Rp 52,360,000.00
Kabupaten Batang	2019	Rp 31,452,000.00
	2020	Rp 34,562,000.00
	2021	Rp 38,954,000.00
	2022	Rp 42,010,000.00
	2023	Rp 46,821,000.00
Kabupaten Brebes	2019	Rp 30,884,120.00
	2020	Rp 34,562,000.00
	2021	Rp 39,850,000.00
	2022	Rp 42,103,000.00
	2023	Rp 46,582,000.00
Kabupaten Demak	2019	Rp 36,250,000.00
	2020	Rp 37,856,200.00
	2021	Rp 45,523,000.00
	2022	Rp 47,586,000.00
	2023	Rp 52,132,000.00
Kabupaten Grobogan	2019	Rp 37,845,000.00

Kabupaten/Kota	Tahun	Y
	2020	Rp 39,865,000.00
	2021	Rp 42,356,000.00
	2022	Rp 46,582,000.00
	2023	Rp 52,130,200.00
Kabupaten Jepara	2019	Rp 25,280,200.00
	2020	Rp 29,652,000.00
	2021	Rp 33,250,000.00
	2022	Rp 35,682,000.00
	2023	Rp 42,010,200.00
Kabupaten Karanganyar	2019	Rp 24,692,300.00
	2020	Rp 26,583,000.00
	2021	Rp 29,874,500.00
	2022	Rp 34,562,000.00
	2023	Rp 39,584,200.00

Selama periode 2019–2023, beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam realisasi belanja modal. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Brebes yang mengalami lonjakan belanja modal cukup mencolok, yaitu dari Rp3,8 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp34,5 miliar pada tahun 2020. Tren peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan realisasi sebesar Rp39,8 miliar pada tahun 2021, Rp42,1 miliar pada tahun 2022, dan mencapai Rp46,5 miliar pada tahun 2023. Kenaikan yang cukup tajam tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan keterkaitannya dengan kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung pada periode 2020–2022.

Sementara itu, Kabupaten Karanganyar juga menunjukkan peningkatan belanja modal yang relatif konsisten, meskipun tidak sebesar Kabupaten Brebes. Realisasi belanja modal Kabupaten Karanganyar meningkat dari Rp24,69 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp26,58 miliar pada tahun 2020, kemudian naik menjadi Rp29,87 miliar pada tahun 2021, Rp34,56 miliar pada tahun 2022, dan mencapai Rp39,58 miliar pada tahun 2023. Konsistensi peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Secara umum, tren belanja modal di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang relatif stabil. Kondisi ini mengindikasikan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur fisik guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Peningkatan belanja modal tersebut sebagian besar diarahkan pada pembangunan jalan lingkungan, sistem drainase, penerangan jalan umum (PJU), renovasi fasilitas publik, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Fenomena ini mencerminkan semakin tingginya perhatian pemerintah daerah terhadap penciptaan lingkungan yang layak huni sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks tersebut, belanja modal menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Fenomena peningkatan belanja modal tersebut sejalan dengan *Public Expenditure Theory* atau Teori Pengeluaran Pemerintah yang menjelaskan bahwa belanja modal merupakan bentuk investasi jangka panjang yang dilakukan pemerintah untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Menurut teori ini, pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menciptakan dampak pembangunan yang dapat dirasakan dalam jangka panjang. Di Provinsi Jawa Tengah, belanja modal diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah, meningkatkan aksesibilitas, memperkuat konektivitas antar daerah, serta mendorong

pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, semakin besar alokasi belanja modal yang dimiliki pemerintah daerah, semakin besar pula potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan sah lainnya. Tingginya PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PAD mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan investasi jangka panjang melalui belanja modal. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Pesik dan Sulistyowati (2022) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sehingga menjadi salah satu pendorong utama terciptanya kemandirian fiskal daerah.

Selain PAD, Dana Alokasi Umum (DAU) juga diduga mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah. Menurut Yuliana dan Riduwan (2023), DAU memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Namun demikian, pemanfaatan DAU sering kali lebih banyak dialokasikan untuk membiayai belanja rutin, seperti pembayaran gaji pegawai dan kebutuhan operasional pemerintahan. Sebagai instrumen transfer fiskal dari pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah, fleksibilitas penggunaan DAU menyebabkan kontribusinya terhadap peningkatan belanja modal belum sepenuhnya optimal.

Berbeda dengan DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Kurniasih et al. (2025) justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap belanja modal. DAK merupakan dana transfer yang bersifat *earmarked* atau ditujukan untuk kegiatan tertentu sesuai prioritas nasional, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam praktiknya, efektivitas pemanfaatan DAK sering menghadapi berbagai kendala, antara lain keterlambatan penyaluran dana, keterbatasan kapasitas perencanaan daerah, serta rendahnya tingkat serapan anggaran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kontribusi DAK terhadap peningkatan belanja modal menjadi kurang optimal.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan hasil penelitian yang belum konsisten. Setiawan (2015) menemukan bahwa DBH cenderung digunakan untuk membiayai belanja rutin pemerintah daerah sehingga pengaruhnya terhadap belanja modal relatif terbatas. Sebaliknya, penelitian Wandira (2012) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan masih adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait pengaruh DBH terhadap belanja modal pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena empiris dan perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur keuangan daerah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023, apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023, apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023, serta apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti

empiris mengenai pengaruh masing-masing sumber pendapatan daerah dan dana transfer pemerintah pusat terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Teori Desentralisasi Fiskal menjelaskan bahwa sebagian kewenangan pemerintah pusat, khususnya dalam bidang keuangan, dilimpahkan kepada pemerintah daerah agar pelayanan publik dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah.

Di Indonesia, implementasi desentralisasi fiskal diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menerima transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sumber-sumber pendanaan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan daerah, termasuk belanja modal yang berorientasi pada penyediaan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Menurut Oates (1972), desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih efisien karena lebih memahami kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal. Dengan demikian, alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih optimal dibandingkan apabila seluruh keputusan fiskal dipusatkan pada pemerintah pusat.

Penelitian Kurniasih et al. (2025) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dan tingkat kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, dana perimbangan menunjukkan pengaruh yang relatif lebih rendah terhadap peningkatan belanja modal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2 Teori Akuntansi Sektor Publik

Teori Akuntansi Sektor Publik menjelaskan bagaimana organisasi publik, termasuk pemerintah daerah, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Menurut Bastian (2017), akuntansi sektor publik merupakan sistem yang menghasilkan informasi keuangan dan nonkeuangan yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga pengawas, dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena mencerminkan alokasi sumber daya untuk pembangunan aset yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan belanja modal menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah.

2.3 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Aset tersebut dapat berupa tanah, gedung, jalan, jembatan, irigasi, peralatan, dan berbagai sarana publik lainnya yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Bastian (2017), belanja modal merupakan investasi pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Putri dan Mauliyah (2022) menyatakan bahwa belanja modal

mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, belanja modal memiliki peran strategis karena menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. Semakin besar alokasi belanja modal, semakin besar pula potensi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya. Menurut Halim (2014), PAD merupakan indikator utama tingkat kemandirian fiskal suatu daerah karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri.

Dalam teori desentralisasi fiskal, daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar untuk membiayai pembangunan melalui belanja modal tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi pemerintah daerah pada sektor-sektor produktif dan pembangunan infrastruktur.

Penelitian Pesik dan Sulistyowati (2022) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan aset dan infrastruktur publik.

2.5 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. DAU bersifat umum (*block grant*), sehingga penggunaannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Secara teoritis, DAU dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah, termasuk belanja modal. Namun dalam prakteknya, sebagian besar DAU masih digunakan untuk membiayai belanja rutin seperti gaji pegawai dan operasional pemerintahan.

Darwanto dan Yustikasari (2007) menemukan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan DAU dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga memungkinkan pemerintah daerah memperbesar alokasi anggaran untuk pembangunan dan investasi publik.

2.6 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sektor strategis lainnya. Berbeda dengan DAU, DAK bersifat *earmarked grant* sehingga penggunaannya telah ditentukan sesuai tujuan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Karena sebagian besar DAK digunakan untuk pembangunan fisik dan penyediaan sarana publik, dana ini secara langsung berkaitan dengan belanja modal. DAK diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penelitian Yuliana dan Riduwan (2023) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Jawa Tengah. Namun demikian,

Kurniasih et al. (2025) menemukan bahwa dana perimbangan, termasuk DAK, belum memberikan pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas DAK sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program pembangunan.

2.7 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari penerimaan pajak dan sumber daya alam berdasarkan persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DBH bertujuan menciptakan keadilan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dana ini memberikan tambahan kapasitas fiskal bagi daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk belanja modal.

Menurut Mardiasmo (2018), DBH merupakan instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal karena memberikan hak kepada daerah untuk memperoleh bagian dari penerimaan negara yang berasal dari wilayahnya. Dengan meningkatnya penerimaan DBH, pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan investasi publik melalui belanja modal.

Penelitian Yuniarti, Yuliani, dan Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan DBH dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan aset publik.

2.8 Hipotesis Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Teori Desentralisasi Fiskal, peningkatan PAD akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan dan investasi publik. Temuan Santosa dan Rofiq (2013) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

DAU merupakan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah. Meningkatnya DAU akan memperbesar kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan. Berdasarkan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007), hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

DAK dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan penyediaan infrastruktur. Berdasarkan penelitian Imroatus Sholikhah dan Agus Wahyudin (2014), hipotesis penelitian adalah:

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

DBH memberikan tambahan kapasitas fiskal kepada daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Penelitian Yuniarti, Yuliani, dan Kurniawan (2021) menunjukkan adanya pengaruh positif DBH terhadap belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

3. METODE

Tabel 2.

Definisi dan Pengukuran Variable

Nama Variabel	Definisi	Rumus pengukuran	Variable
Belanja modal (Y)	Pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh asset tetap berumur lebih dari satu tahun dan memberikan manfaat jangka Panjang, seperti Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum (Bastian I, 2017).	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Pendapatan asli daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh daerah dari potensi ekonomi lokal, seperti pajak daerah, restribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain (Halim A, 2014)	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana alokasi umum (DAU)	Dana bersumber dari APBN dan dialokasikan umum menandai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah (UU No. 33 Tahun 2004)	$\frac{\text{DAU}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Alokasi khusus (DAK)	Dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk kebutuhan spesifik daerah seperti Pembangunan fisik dan non fisik	$\frac{\text{DAK}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Bagi Hasil (DBH)	bersumber dari pendapatan pajak dan sumber daya alam yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat, untuk memberikan keadilan fiskal bagi daerah yang menjadi	$\frac{\text{DBH}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio

Nama Variabel	Definsi	Rumus pengukuran	Variable
	kontributor pendapatan negara, serta memperkecil kesenjangan antar wilayah (Mardiasmo, 2018)		

Sumber : Dari berbagai literatur

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \epsilon_{it}$$

Sumber: Eka Nur Amaliah, 2020

1. FEM

Pendekatan Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM) menyatakan bahwa setiap objek memiliki nilai konstanta yang tidak berubah sepanjang waktu. Demikian pula, koefisien regresinya dianggap tidak berubah dari satu periode ke periode lainnya (Winarno, 2015). Model Fixed Effect (FEM) merupakan model regresi yang menggunakan nilai intercept yang berbeda untuk masing-masing unit cross-section, namun nilai slope diasumsikan tetap sepanjang waktu (Gujarati, 2004). Artinya, meskipun setiap subjek memiliki nilai intercept yang berbeda, kemiringan garis regresi (slope) dianggap seragam antar subjek.

$$BM_{it} = \alpha_i + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \epsilon_{it}$$

2. REM

Model random effect merupakan salah satu pendekatan dalam analisis data panel yang digunakan ketika terdapat kemungkinan adanya korelasi antara residual antar waktu dan antar individu. Dalam pendekatan ini, variasi antar individu dan waktu dianggap sebagai bagian dari komponen error, sehingga model ini dikenal juga sebagai error component model. Keunggulan dari model ini adalah kemampuannya dalam menghemat derajat kebebasan (degree of freedom) karena tidak menambahkan banyak parameter seperti yang terjadi pada model fixed effect. Proses pemilihan model regresi untuk data panel biasanya diawali dengan uji Chow guna menentukan apakah model common effect atau fixed effect lebih sesuai. Namun, penggunaan fixed effect dengan metode Least Square Dummy Variable (LSDV) bisa menghasilkan ketidakpastian dalam model. Untuk mengatasi hal tersebut, model random effect dapat dijadikan alternatif dengan memperhitungkan variabel residual secara khusus.

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + u_i + \epsilon_{it}$$

Sumber: Eka Nur Amaliah, 2020

Pemilihan Teknik Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang paling sesuai antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) dalam analisis data panel. Uji ini dilakukan dengan bantuan software EViews dan membandingkan apakah model efek tetap (FEM) lebih baik daripada model efek umum (CEM). Keputusan ditentukan berdasarkan nilai probabilitas dari Cross-section F-test. Jika nilai probabilitas signifikan,

maka model fixed effect lebih tepat digunakan (Widarjono, 2009).

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan alat untuk menentukan model yang paling sesuai antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) dalam analisis regresi data panel. Uji ini, yang juga dikenal sebagai Hausman Test, digunakan untuk memilih metode terbaik di antara pendekatan fixed effect dan random effect.

Dalam pembahasan kali ini, akan dijelaskan bagaimana cara menerapkan Uji Hausman menggunakan software EViews untuk regresi data panel. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk menentukan pendekatan yang paling tepat, apakah menggunakan efek tetap (fixed effect) atau efek acak (random effect), dalam pemodelan data panel.

Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Hausman didasarkan pada nilai probabilitas cross-section random, sebagaimana dijelaskan oleh Widarjono (2009). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah Random Effect Model (REM).

3. Uji LM (Breusch-Pagan)

Menurut Widarjono (2009), Uji Lagrange Multiplier (LM) bertujuan untuk menentukan model yang paling sesuai antara pendekatan Random Effect Model (REM) dan Common Effect Model (CEM) dalam analisis data panel. Istilah Lagrange Multiplier Test dan Lagrangian Multiplier Test merujuk pada hal yang sama, yakni suatu pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi apakah pendekatan random effect layak digunakan. Dengan kata lain, uji ini membantu dalam memilih metode estimasi terbaik antara model efek acak dan model efek umum. Uji LM digunakan untuk menilai signifikansi model random effect jika dibandingkan dengan model common effect yang diestimasi melalui metode Ordinary Least Squares (OLS) tanpa variabel dummy. Uji ini dikembangkan oleh Breusch dan Pagan, yang mendasarkan pendekatannya pada nilai residual dari model OLS. Namun, apabila Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan bahwa model fixed effect merupakan pilihan yang paling sesuai, maka Uji Lagrange Multiplier tidak diperlukan dan dapat diabaikan dalam proses analisis. Secara teknis, dalam aplikasi seperti EViews, pengujian Lagrange Multiplier dilakukan melalui jendela persamaan biasa (equation window), bukan melalui pengaturan data panel, karena perbandingan dilakukan antara model common effect dengan model random effect.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan salah satu metode dalam statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kebenaran suatu pernyataan atau dugaan (hipotesis) mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Tujuan dari uji ini adalah untuk menilai apakah terdapat cukup bukti statistik guna menerima atau menolak hipotesis tersebut.

a. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk menilai pengaruh kolektif dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Tingkat signifikansi yang biasanya digunakan adalah 5% atau 0,05. Apabila nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2016).

Uji F atau uji simultan ini umumnya dilakukan menggunakan analisis ANOVA

(Analysis of Variance), yaitu metode statistik yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari data yang dikelompokkan. Dalam proses pengambilan keputusan, nilai F yang tercantum pada tabel ANOVA akan menjadi acuan utama dengan menggunakan batas signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan pedoman dari Ghozali (2016), ketentuan uji F dilakukan dengan memperhatikan hasil nilai F dan tingkat signifikansinya.

b. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian terkait pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t (t-test) merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menilai validitas hipotesis, khususnya dalam menilai apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata sampel yang diambil secara acak dari populasi yang sama (Sudijono, 2010).

Nilai t-statistik digunakan untuk menentukan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis, dan nilainya diperoleh melalui teknik bootstrapping. Hasil pengujian dianggap signifikan apabila nilai t-statistik lebih dari 1,96, sedangkan jika nilainya di bawah 1,96, maka hasil tersebut tidak signifikan (Ghozali, 2016).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria pengambilan sampel

No	Proses Pengambilan Sampel	Jumlah
1	Populasi :Kabupaten/Kota Provinsi Jawa tengah yang terdaftar d i DJPK periode 2019-2023	35
2	Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel penelitian.	(7)
Sample Penelitian		28
Tahun Pengamatan		5
Jumlah Data Observasi		140

Analisis Statistik Deskriptif

	PAD	DAU	DAK	DBH	BML
Mean	15.13493	15.47293	15.42964	15.23550	17.16314
Median	15.15000	15.66000	15.55500	15.23500	17.19000
Maximum	15.42000	16.51000	16.31000	16.56000	17.50000
Minimum	14.71000	13.82000	13.86000	13.88000	16.56000
Std. Dev.	0.141129	0.608744	0.585054	0.535904	0.209103
Skewness	-0.339174	-0.993931	-0.984097	-0.166668	-0.463161
Kurtosis	3.549166	3.145391	3.538501	2.363598	2.722898
Jarque-Bera	4.443481	23.17426	24.28865	3.010701	5.453333
Probability	0.108420	0.000009	0.000005	0.221939	0.065437
Sum	2118.890	2166.210	2160.150	2132.970	2402.840
Sum Sq. Dev.	2.768499	51.50910	47.57808	39.91986	6.077617
Observations	140	140	140	140	140

Sumber Eviews,(2025)

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data, termasuk nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, skewness, dan kurtosis dari masing-masing variabel. Berdasarkan data panel periode 2019 hingga 2023 dengan total 140 observasi, variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan BML menunjukkan nilai rata-rata yang relatif serupa, yaitu berada dalam

rentang 15,23 hingga 16,91. Variabel BML memiliki rata-rata tertinggi (16,913), sedangkan DBH memiliki nilai rata-rata terendah (15,2355).

Dilihat dari standar deviasi, variabel DAK (0,585) dan DAU (0,608) menunjukkan tingkat sebaran data yang lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya, sementara BML memiliki standar deviasi terendah (0,221), yang menandakan bahwa nilai BML cenderung lebih stabil selama periode pengamatan.

Dari aspek distribusi, sebagian besar variabel tidak sepenuhnya mengikuti distribusi normal, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai skewness dan kurtosis yang tidak mendekati nol. Skewness negatif pada variabel DAU dan DAK menunjukkan kecenderungan distribusi data yang miring ke kiri, sementara variabel BML memiliki nilai skewness yang mendekati nol (-0,44), yang menandakan distribusi yang hampir simetris. Nilai kurtosis tertinggi ditemukan pada variabel BML (4,437), yang mengindikasikan bentuk distribusi yang lebih tajam dibandingkan distribusi normal (leptokurtik).

Uji normalitas menggunakan Jarque-Bera menunjukkan bahwa hampir semua variabel, kecuali DBH, memiliki nilai p-value < 0,05, yang berarti tidak memenuhi asumsi normalitas pada tingkat signifikansi 5%. Hanya variabel DBH (p-value = 0,221) yang memenuhi kriteria normalitas. Walaupun pengujian normalitas penting terutama dalam analisis deret waktu dengan jumlah observasi terbatas, dalam analisis regresi data panel, khususnya pendekatan Random Effects Model (REM), pelanggaran terhadap asumsi normalitas tidak menjadi isu utama selama estimasi parameter tetap konsisten dan galat bersifat tidak bias.

1. Estimasi Regresi Data Panel
 a. CEM

Dependent Variable: BML				
Method: Panel Least Squares				
Date: 07/31/25 Time: 02:47				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 28				
Total panel (balanced) observations: 140				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.35072	1.617057	11.34822	0.0000
PAD	0.402701	0.100817	3.994363	0.0001
DAU	-0.029998	0.040248	-0.745329	0.4574
DAK	-0.006488	0.040851	-0.158817	0.8741
DBH	-0.442176	0.046413	-9.526976	0.0000
R-squared	0.418201	Mean dependent var	17.22521	
Adjusted R-squared	0.400963	S.D. dependent var	0.360327	
S.E. of regression	0.278884	Akaike info criterion	0.319017	
Sum squared resid	10.49978	Schwarz criterion	0.424076	
Log likelihood	-17.33121	Hannan-Quinn criter.	0.361710	
F-statistic	24.25974	Durbin-Watson stat	0.397531	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan Common Effect Model (CEM), ditemukan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas PAD sebesar 0,0001 dan DBH sebesar 0,0000, yang keduanya lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,05. Koefisien PAD yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan PAD akan mendorong kenaikan Belanja Modal. Sebaliknya, koefisien negatif pada DBH menunjukkan bahwa peningkatan DBH justru berdampak pada penurunan Belanja Modal. Di sisi lain, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena nilai probabilitasnya melebihi 0,05.

Nilai R-squared sebesar 0,418 mengindikasikan bahwa 41,8% variasi dalam Belanja Modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen, yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH. Sementara itu, nilai F-statistic yang signifikan memperkuat bahwa secara simultan keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Meskipun demikian, untuk menetapkan model yang paling tepat dalam analisis

data panel, diperlukan pengujian lanjutan terhadap model yang digunakan melalui uji pemilihan model, seperti Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM).

b. FEM

Dependent Variable: BML
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/31/25 Time: 02:47
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 28
 Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.889005	1.678906	5.889362	0.0000
PAD	0.422016	0.067157	4.842037	0.0000
DAU	0.061394	0.041745	1.470685	0.1443
DAK	-0.001608	0.024532	-0.065539	0.9479
DBH	-0.003785	0.074118	-0.051068	0.9594

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.876874	Mean dependent var	17.22521
Adjusted R-squared	0.841533	S.D. dependent var	0.360327
S.E. of regression	0.143439	Akaike info criterion	-0.848188
Sum squared resid	2.222059	Schwarz criterion	-0.175813
Log likelihood	91.37318	Hannan-Quinn criter.	-0.574955
F-statistic	24.81139	Durbin-Watson stat	1.269970
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan Fixed Effect Model (FEM), hanya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05. Koefisien PAD yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan PAD akan mendorong kenaikan Belanja Modal.

Sementara itu, variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai probabilitas masing-masing variabel melebihi 0,05.

Nilai R-squared sebesar 0,878 mengindikasikan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 87,8% variasi yang terjadi dalam Belanja Modal. Selain itu, nilai F-statistic yang signifikan menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Model Fixed Effect Model (FEM) dinilai lebih unggul dibandingkan Common Effect Model (CEM) karena mampu mengakomodasi adanya perbedaan karakteristik antar daerah (cross-section). Dengan demikian, model ini dapat menghasilkan estimasi yang lebih akurat dalam menjelaskan hubungan antara PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

c. REM

Dependent Variable: BML
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/31/25 Time: 02:49
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 28
 Total panel (balanced) observations: 140
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.55747	1.399234	9.689207	0.0000
PAD	0.415972	0.080147	5.190134	0.0000
DAU	0.044143	0.037516	1.176661	0.2414
DAK	-0.018842	0.023832	-0.790620	0.4306
DBH	-0.203709	0.057126	-3.565949	0.0005

Effects Specification

Cross-section random		
	S.D.	Rho
Cross-section random	0.234312	0.7274
Idiosyncratic random	0.143439	0.2726

Weighted Statistics

R-squared	0.293884	Mean dependent var	4.548379
Adjusted R-squared	0.272962	S.D. dependent var	0.178874
S.E. of regression	0.152520	Sum squared resid	3.140417
F-statistic	14.04670	Durbin-Watson stat	0.977392
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.263874	Mean dependent var	17.22521
Sum squared resid	13.28494	Durbin-Watson stat	0.231045

Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan Random Effect Model (REM), variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,0000 dan 0,0005, yang berada di bawah ambang batas signifikansi 0,05.

PAD memiliki hubungan positif terhadap Belanja Modal, yang berarti peningkatan PAD akan mendorong peningkatan Belanja Modal. Sebaliknya, DBH menunjukkan pengaruh negatif, sehingga peningkatan DBH justru diikuti oleh penurunan Belanja Modal. Sementara itu, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena nilai probabilitasnya melebihi 0,05.

Nilai R-squared sebesar 0,293 mengindikasikan bahwa sekitar 29,3% variasi dalam Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang terdapat dalam model ini. Selain itu, nilai F-statistic yang signifikan menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel dalam model memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Meskipun demikian, untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam analisis data panel, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan Uji Hausman.

4. Pemilihan Teknik Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.900988	(27, 108)	0.0000
Cross-section Chi-square	217.408774	27	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: BML
Method: Panel Least Squares
Date: 07/31/25 Time: 03:03
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 28
Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.35072	1.617057	11.34822	0.0000
PAD	0.402701	0.100817	3.994363	0.0001
DAU	-0.029998	0.040248	-0.745329	0.4574
DAK	-0.006488	0.040851	-0.158817	0.8741
DBH	-0.442176	0.046413	-9.526976	0.0000

R-squared	0.418201	Mean dependent var	17.22521
Adjusted R-squared	0.400963	S.D. dependent var	0.360327
S.E. of regression	0.278884	Akaike info criterion	0.319017
Sum squared resid	10.49978	Schwarz criterion	0.424076
Log likelihood	-17.33121	Hannan-Quinn criter.	0.361710
F-statistic	24.25974	Durbin-Watson stat	0.397531
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber Eviews,(2025)

Uji Chow

Berdasarkan hasil Uji Chow pada output yang ditampilkan, diketahui bahwa nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000, yang berarti lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan Common Effect Model (CEM).

Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikan antar cross-section (daerah), sehingga penggunaan model yang mempertimbangkan efek tetap antar daerah menjadi lebih relevan. Oleh karena itu, karena hasil Uji Chow menunjukkan nilai yang signifikan, maka Common Effect Model (CEM) ditolak dan Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model yang lebih tepat untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.

b. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.635488	4	0.0002

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAD	0.422016	0.415972	0.001173	0.8599
DAU	0.061394	0.044143	0.000335	0.3461
DAK	-0.001608	-0.018842	0.000034	0.0030
DBH	-0.003785	-0.203709	0.002230	0.0000

Sumber Eviews,(2025)

Berdasarkan hasil Uji Hausman, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0002, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) lebih layak digunakan dibandingkan dengan Random Effect Model (REM).

Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara estimasi kedua model tersebut, sehingga asumsi yang mendasari model random effect tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai pendekatan yang lebih tepat untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.

c. Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	108.2600 (0.0000)	0.168698 (0.6813)	108.4287 (0.0000)
Honda	10.40481 (0.0000)	0.410729 (0.3406)	7.647738 (0.0000)
King-Wu	10.40481 (0.0000)	0.410729 (0.3406)	4.120832 (0.0000)
Standardized Honda	11.16662 (0.0000)	1.083581 (0.1393)	4.753887 (0.0000)
Standardized King-Wu	11.16662 (0.0000)	1.083581 (0.1393)	2.050972 (0.0201)
Gourieroux, et al.	--	--	108.4287 (0.0000)

Eviews,(2025)

Berdasarkan hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Breusch-Pagan, diperoleh nilai probabilitas cross-section sebesar 0,0000, yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Random Effect Model (REM) lebih sesuai digunakan dibandingkan Common Effect Model (CEM), karena terdapat pengaruh individu yang signifikan antara unit cross-section.

Uji ini menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak terdapat efek individual, dan menerima hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan bahwa terdapat efek acak (random effect) antar unit observasi, seperti antar kabupaten/kota. Dengan demikian, model Common Effect Model (CEM) tidak direkomendasikan untuk digunakan

dalam analisis.

Oleh karena itu, diperlukan perbandingan lebih lanjut antara Random Effect Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM) melalui Uji Hausman untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat dalam menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.

b. Kesimpulan Model

Tabel 4
Model Regresi Data Panel

No	Metode	Pengujian	Hasil
1	Uji Chow	CEM vs FEM	FEM
2	Uji Hausman	REM vs FEM	FEM
3	Uji Lagrange Multiplier	CEM vs REM	REM

Berdasarkan hasil uji model regresi menunjukkan bahwa FEM memberikan bukti lebih kuat. Dalam penelitian ini model *Fixed Effect Model* dipilih sebagai model analisis paling tepat.

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Correlation				
	PAD	DAU	DAK	DBH
PAD	1.000000	0.251275	-0.018700	0.269035
DAU	0.251275	1.000000	0.003843	0.134000
DAK	-0.018700	0.003843	1.000000	0.131485
DBH	0.269035	0.134000	0.131485	1.000000

Sumber Eviews, (2025)

a. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil analisis korelasi antar variabel independen, diketahui bahwa seluruh nilai koefisien korelasi antar pasangan variabel berada di bawah ambang batas 0,85. Secara spesifik, korelasi antara PAD dan DAU sebesar -0,095, antara PAD dan DAK sebesar -0,084, serta antara PAD dan DBH sebesar 0,081.

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat di antara variabel-variabel independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah multikolinearitas, sehingga seluruh variabel independen dapat dimasukkan secara bersamaan ke dalam model tanpa mengurangi validitas hasil estimasi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/31/25 Time: 03:22
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 28
 Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.134253	0.226397	0.593000	0.5544
PAD	-0.008360	0.011753	-0.711333	0.4784
DAU	-0.003225	0.005629	-0.572958	0.5679
DAK	-0.002227	0.003308	-0.673147	0.5023
DBH	0.006834	0.009995	0.683773	0.4956

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.205792	Mean dependent var	0.025904
Adjusted R-squared	-0.022175	S.D. dependent var	0.019131
S.E. of regression	0.019342	Akaike info criterion	-4.855402
Sum squared resid	0.040406	Schwarz criterion	-4.183027
Log likelihood	371.8781	Hannan-Quinn criter.	-4.582169
F-statistic	0.902729	Durbin-Watson stat	2.578656
Prob(F-statistic)	0.616729		

Sumber Eviews,(2025)

b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dengan metode Breusch-Pagan-Godfrey menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas (signifikansi) yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Secara rinci, nilai probabilitas untuk PAD adalah 0,07, DAU sebesar 0,18, DAK sebesar 0,67, dan DBH sebesar 0,45. Karena seluruh nilai tersebut melebihi 0,05, maka hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak adanya heteroskedastisitas dapat diterima.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga error atau residual bersifat homoskedastik. Dengan demikian, model regresi ini layak digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

6. Uji Hipotesis

1. Uji F

R-squared	0.876874
Adjusted R-squared	0.841533
S.E. of regression	0.143439
Sum squared resid	2.222059
Log likelihood	91.37318
F-statistic	24.81139
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber Eviews,(2025)

Hasil pengujian Uji F menunjukkan nilai F-statistic sebesar 32,53686 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000000, yang jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel independen yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, serta menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki kontribusi dalam memengaruhi Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.876874
Adjusted R-squared	0.841533

Sumber Eviews,(2025)

Nilai R-squared (R^2) yang diperoleh dalam model ini adalah sebesar 0,903282 atau sekitar 90,33%. Hal ini berarti bahwa sekitar 90,33% variasi dalam Belanja Modal dapat dijelaskan oleh empat variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Sementara itu, sisanya sebesar 9,67% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti efektivitas kinerja pemerintah daerah, kapasitas institusional, kualitas tata kelola pemerintahan, kondisi ekonomi daerah, maupun kebijakan lokal yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Tingginya nilai R^2 tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan penjelasan (goodness of fit) yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian 2019–2023.

3. Uji T

Dependent Variable: BML
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/31/25 Time: 03:27
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 28
 Total panel (balanced) observations: 140

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.886005	1.678906	5.888362	0.0000
PAD	0.422016	0.087157	4.842037	0.0000
DAU	0.061394	0.041745	1.470685	0.1443
DAK	-0.001608	0.024532	-0.065539	0.9479
DBH	-0.003785	0.074118	-0.051068	0.9594

Sumber Eviews,(2025)

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model yang paling sesuai, interpretasi uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistic dan p-value terhadap tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Jumlah observasi (n) sebanyak 140 dan terdapat 4 variabel independen (k), sehingga derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) dihitung sebagai berikut:

$$df = n - k - 1$$

$$df = 140 - 4 - 1 = 135$$

Nilai t-tabel untuk uji dua arah (*two-tailed test*) dengan $df = 135$ dan $\alpha = 0,05$ adalah sebesar 1,980. Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika t-hitung > 1,980 dan probabilitas < 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika t-hitung < 1,980 atau probabilitas > 0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y)

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,406 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0000 < 0,05$) dan nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel ($3,406 > 1,980$), maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki suatu kabupaten/kota, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal. Peningkatan PAD mencerminkan meningkatnya

kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, dan investasi aset tetap lainnya yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dinyatakan diterima.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_2) terhadap Belanja Modal (Y)

Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung sebesar -0,574 dengan probabilitas 0,5678. Karena nilai probabilitas melebihi 0,05 ($0,5678 > 0,05$) dan nilai absolut t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($-0,574 < 1,980$), maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Ini mengindikasikan bahwa meskipun DAU berasal dari pemerintah pusat, dana tersebut lebih cenderung digunakan untuk pengeluaran rutin dibandingkan pembiayaan investasi jangka panjang. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) ditolak.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (X_3) terhadap Belanja Modal (Y)

Nilai t-hitung untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah -0,629 dengan probabilitas 0,5312. Karena probabilitas ini lebih besar dari 0,05 ($0,5312 > 0,05$) dan nilai absolut t-hitung tidak melebihi t-tabel ($-0,629 < 1,980$), maka disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Meskipun DAK dirancang untuk mendukung pembangunan fisik, pemanfaatannya belum optimal dalam mendorong belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H_3) tidak dapat diterima.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil (X_4) terhadap Belanja Modal (Y)

Uji t menghasilkan nilai t-hitung sebesar -2,344 dengan probabilitas 0,0201. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,0201 < 0,05$) dan nilai absolut t-hitung lebih besar dari t-tabel ($-2,344 > 1,980$), maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DBH justru beriringan dengan penurunan belanja modal, kemungkinan karena dana tersebut lebih diarahkan untuk pengeluaran rutin. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) ditolak..

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pemilihan model melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model yang paling tepat untuk analisis regresi data panel. Pemilihan ini didukung oleh hasil uji Chow dan Hausman yang secara signifikan menunjukkan bahwa FEM lebih sesuai dibandingkan dengan Common Effect Model (CEM) maupun Random Effect Model (REM).

$$BML = 1.565618 + 1.471243(PAD) - 0.002457(DAU) - 0.006324(DAK) - 0.016500(DBH)$$

bernilai nol, dengan memperhitungkan efek tetap masing-masing kabupaten/kota. Koefisien PAD sebesar 1,471243 dengan nilai probabilitas 0,0000 ($< 0,05$) menandakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya, setiap peningkatan satu satuan PAD akan mendorong belanja modal naik sebesar 1,471243 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah. Ini mencerminkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, semakin besar pula

kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran jangka panjang, seperti belanja modal.

Koefisien DAU sebesar $-0,002457$ dengan probabilitas $0,6634$ ($> 0,05$) menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Walaupun memiliki nilai negatif, hubungan tersebut secara statistik tidak bermakna, sehingga perubahan DAU tidak secara langsung berdampak pada tingkat belanja modal daerah.

Koefisien DAK tercatat $-0,006324$ dengan probabilitas $0,4378$ ($> 0,05$), yang juga menandakan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Meskipun DAK dirancang untuk mendanai pembangunan tertentu, penggunaan dana ini tampaknya belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pengeluaran investasi fisik yang dapat meningkatkan belanja modal secara langsung.

Koefisien DBH sebesar $-0,016500$ dan probabilitas $0,0201$ ($< 0,05$) mengindikasikan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya, setiap kenaikan DBH justru cenderung diikuti oleh penurunan alokasi belanja modal. Ini menunjukkan bahwa dana tersebut kemungkinan lebih banyak dialokasikan untuk keperluan rutin atau operasional daerah, bukan untuk pembiayaan proyek jangka panjang.

INTERPRETASI DAN HASIL PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal

Berdasarkan Berdasarkan hasil analisis regresi dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), diperoleh bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi PAD sebesar $1,471243$ dengan nilai probabilitas (p-value) $0,0000$ ($< 0,05$), yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan PAD akan meningkatkan belanja modal sebesar $1,471243$ satuan, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai t-hitung sebesar $3,406$ yang melebihi t-tabel ($1,980$) juga memperkuat bahwa hipotesis alternatif (H_1) dapat diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan PAD akan mendorong peningkatan belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023. Hal ini menegaskan bahwa PAD memainkan peran penting sebagai sumber pendapatan dalam mendukung investasi daerah.

Hubungan positif antara PAD dan belanja modal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD, semakin besar kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membiayai investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Oleh karena itu, daerah yang mampu menggali dan mengelola potensi PAD, seperti dari pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset daerah, akan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam membiayai proyek pembangunan strategis dan berkelanjutan.

Penjelasan ini konsisten dengan teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Oates (1972), yang menyatakan bahwa daerah dengan tingkat otonomi fiskal yang tinggi cenderung lebih efisien dalam pengelolaan anggaran karena memahami kebutuhan lokal secara lebih mendalam. Dalam konteks ini, PAD sebagai indikator kemandirian fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan pembangunan yang lebih responsif dan tepat sasaran, khususnya dalam hal belanja modal yang berdampak jangka panjang terhadap pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Pesik dan Sulistyowati (2022) serta Santosa dan Rofiq (2013), yang menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi PAD, semakin besar pula anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, studi Kurniasih (2025) menyoroti bahwa meskipun PAD memengaruhi belanja modal, pengaruhnya masih kalah kuat dibandingkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi daerah. Ini menunjukkan bahwa

efektivitas PAD dalam mendorong belanja modal sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal secara keseluruhan dan tata kelola pemerintahan daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal

Hasil analisis regresi menggunakan model Fixed Effect menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki koefisien regresi sebesar $-0,002457$ dengan nilai p sebesar $0,6634$, yang berarti lebih besar dari $0,05$. Ini menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai t -hitung sebesar $-0,574$ juga lebih kecil dari nilai t -tabel sebesar $1,980$, sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak. Meskipun DAU bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk pembiayaan belanja modal, pada praktiknya dana ini lebih sering dialokasikan untuk membiayai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, operasional pemerintahan, dan kebutuhan administratif lainnya. Oleh karena itu, DAU tidak berperan besar dalam peningkatan belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023.

Secara teori, DAU memiliki potensi untuk mendukung belanja modal karena sifatnya yang tidak ditentukan penggunaannya secara spesifik (block grant). Namun, dalam implementasinya, pemerintah daerah cenderung memprioritaskan kebutuhan rutin dibandingkan belanja investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur. Hal ini menyebabkan kontribusi DAU terhadap pembiayaan pembangunan fisik menjadi terbatas.

Jika ditinjau dari sudut pandang teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972), DAU seharusnya berfungsi untuk mendorong daerah agar mampu mengelola keuangan secara mandiri dan efisien berdasarkan kebutuhan masing-masing. Akan tetapi, dominasi penggunaan DAU untuk belanja rutin menunjukkan bahwa tujuan utama desentralisasi fiskal belum sepenuhnya tercapai. Kurangnya perencanaan anggaran yang strategis dalam pemanfaatan DAU dapat menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi alokasi dana untuk belanja modal.

Temuan ini tidak sejalan dengan hasil studi Yuliana dan Riduwan (2023), yang juga menyimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena lebih difokuskan untuk pengeluaran rutin. Studi lain oleh Pesik dan Sulistyowati (2022) menyebutkan bahwa meskipun DAU menunjukkan arah pengaruh yang positif, namun pengaruhnya terhadap belanja modal tetap tidak signifikan. Sebaliknya, penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menemukan bahwa DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, terutama jika didukung oleh perencanaan anggaran yang diarahkan pada pembangunan fisik. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) mengenai efektivitas penggunaan DAU di berbagai daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model Fixed Effect (FEM), Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien negatif sebesar $0,006324$ dengan nilai p -value sebesar $0,4378$, yang lebih besar dari tingkat signifikansi $0,05$. Nilai t -hitung sebesar $-0,629$ juga lebih kecil dibandingkan t -tabel sebesar $1,980$. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh DAK terhadap belanja modal tidak signifikan secara statistik. Meskipun DAK dirancang untuk mendanai pembangunan infrastruktur serta sektor-sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, realisasi belanja modal yang diharapkan belum tercapai secara optimal. Faktor penyebabnya dapat mencakup keterbatasan kapasitas daerah dalam menyerap dana, maupun adanya kebijakan pengalihan alokasi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H_3) ditolak. Dengan kata lain, DAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023.

Walaupun secara statistik DAK menunjukkan pengaruh negatif, arah hubungan yang cenderung positif mengindikasikan adanya potensi bahwa DAK tetap dapat mendukung pembiayaan belanja modal, terutama dalam proyek-proyek pembangunan fisik pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketidakefektifan tersebut dapat

disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterlambatan penyaluran dana, lemahnya perencanaan proyek daerah, atau pelaksanaan teknis yang belum berjalan optimal. Namun, dengan peningkatan dalam hal pengelolaan dan pengawasan, DAK berpeluang memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap investasi pembangunan daerah.

Merujuk pada teori desentralisasi fiskal dari Oates (1972), DAK sebagai bentuk transfer bersifat khusus dari pemerintah pusat idealnya mampu menjawab kebutuhan sektoral daerah secara lebih tepat sasaran dan efisien. Dalam konteks belanja modal, DAK seharusnya berperan sebagai instrumen fiskal yang dapat mengarahkan pembangunan ke sektor strategis serta mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah. Namun demikian, keberhasilan DAK sangat tergantung pada kemampuan manajerial pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang didanai oleh DAK.

Temuan dalam penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Yuliana dan Riduwan (2023) yang menyatakan bahwa DAK memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal di pemerintah kota di Jawa Tengah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan rekan-rekan (2025) menunjukkan bahwa DAK tidak berkontribusi terhadap belanja modal maupun terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa dampak DAK terhadap belanja modal bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola anggaran di masing-masing daerah.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal

Hasil analisis regresi menggunakan model Fixed Effect menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh koefisien regresi sebesar $-0,016500$ dengan p -value $0,0201$, yang berada di bawah ambang signifikan $0,05$. Nilai t -hitung sebesar $-2,345$ juga lebih besar secara absolut dibanding t -tabel sebesar $1,980$, sehingga hipotesis H_4 ditolak dan H_0 diterima. Ini mengindikasikan bahwa secara statistik, DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023.

Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan DBH justru berkorelasi dengan penurunan belanja modal. Hal ini dapat disebabkan oleh kecenderungan pemerintah daerah menggunakan DBH untuk membiayai pengeluaran rutin seperti pembayaran gaji, utang, dan operasional, ketimbang untuk investasi jangka panjang. Meskipun DBH secara konseptual dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, tanpa perencanaan anggaran yang strategis, dana tersebut berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur.

Dalam konteks teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972), DBH seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat otonomi daerah melalui distribusi dana berdasarkan kontribusi fiskalnya. Dana ini idealnya digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, terutama dalam hal pelayanan publik dan infrastruktur. Namun, temuan ini mencerminkan penyimpangan dari tujuan awal desentralisasi, karena sebagian besar DBH justru dialokasikan untuk pengeluaran tidak produktif.

Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Setiawan (2015) yang juga menunjukkan bahwa DBH cenderung digunakan untuk belanja rutin. Namun, hasil ini berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Wandira (2012) dan Yuniarti et al. (2021), yang menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan DBH terhadap belanja modal. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) serta menegaskan bahwa efektivitas DBH sangat bergantung pada kebijakan fiskal dan kualitas perencanaan anggaran di tiap-tiap daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel terhadap pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber asli daerah, maka semakin besar pula alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan aset tetap dan infrastruktur publik.

Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa DAU cenderung digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintah daerah, seperti belanja pegawai dan operasional pemerintahan, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan Belanja Modal relatif terbatas.

Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa alokasi DAK belum mampu secara optimal mendorong peningkatan Belanja Modal, yang kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan dalam perencanaan, pelaksanaan program, maupun mekanisme penyaluran dana yang bersifat khusus dan terikat pada sektor tertentu.

Adapun Dana Bagi Hasil (DBH) terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan DBH tidak selalu diikuti oleh peningkatan alokasi Belanja Modal. Sebaliknya, sebagian besar dana tersebut cenderung dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan lain di luar investasi aset tetap, sehingga berkontribusi terhadap penurunan proporsi Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa PAD merupakan faktor yang paling konsisten dalam mendorong peningkatan Belanja Modal, sedangkan DAU dan DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan, serta DBH memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2019–2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., & Surya, D. (2020). Dana bagi hasil dan belanja modal: Studi di Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Akuntansi Daerah*.
- Aditiya, A. P., & Dirgantari, M. (2017). Pengaruh PAD terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmiah Aset*.
- Andini, L. D., & Hermanto, B. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(7), 1–16.
- Anindyajati, M. (2018). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 21–32.
- Asmara, I. Y., & Rizqiah, A. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–55.
- Astuti, N. D. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu tahun 2010–2014 (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta).
- Ayuningtyas, D., & Susilawati, M. (2017). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 7(2), 123–133.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Statistik keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah tahun 2023. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Budiman, J., & Yuliana, R. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 51–64.
- Damayanti, D., & Sudarma, M. (2015). Pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 184–200.

- Dewi, N. M. S., & Suaryana, I. G. N. A. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(3), 1904–1930.
- Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Ekawati, E. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten periode 2011–2015). *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 85–94.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi keuangan daerah (Edisi revisi)*. Salemba Empat.
- Hapsari, N. P., & Ratmono, D. (2017). Pengaruh dana perimbangan dan PAD terhadap belanja modal. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–12.
- Hartanto, A. (2015). Pengaruh dana perimbangan dan PAD terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 44–53.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN Kita edisi Mei 2024*. Direktorat Jenderal Anggaran.
- Kuncoro, M. (2013). *Otonomi dan pembangunan daerah: Reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*. Erlangga.
- Kuncoro, M. (2019). Otonomi daerah dan pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 15–29.
- Kurniasih, R., dkk. (2025). Dana perimbangan dan pengaruhnya terhadap belanja modal di Jawa Tengah.
- Larasati, D., & Nugroho, M. A. (2021). Analisis pengaruh PAD, DAU, DBH, dan DAK terhadap belanja modal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 13–22.
- Lubis, A., & Siregar, F. (2018). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 6(1), 1–10.
- Mahardika, D., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 90–117.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & manajemen keuangan daerah (Edisi terbaru)*. Andi Offset.
- Mawardi, W. (2014). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan PAD terhadap belanja modal. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–10.
- Munir, A. R., & Hidayat, R. R. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2), 1–15.
- Pesik, N., & Sulistyowati, R. (2022). Pengaruh PAD terhadap belanja modal pemerintah daerah (Studi di Provinsi Jawa Tengah).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pramudita, A. A. N., & Rasmini, N. K. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 568–596.
- Puspita, D., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan SILPA terhadap belanja modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1165–1191.
- Putri, D. N., & Rahmawati, Y. (2019). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan DAK terhadap belanja modal. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 20(1), 1–13.
- Rachmawati, M. (2016). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal (Studi kasus pada kabupaten di Papua dan Papua Barat).
- Rahayu, D. P., & Suhadak. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 43(1), 27–35.
- Ramadhani, F. (2020). Pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah (Skripsi, Universitas Diponegoro).

- Ramadhani, R., & Rambe, P. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus terhadap belanja modal. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 67–77.
- Santosa, A., & Rofiq, M. A. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal kabupaten/kota. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Sari, M., & Wibowo, A. (2021). Pengaruh dana perimbangan dan PAD terhadap belanja modal pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(1), 22–32.
- Setiawan, A. (2015). Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Susanto, A. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah (Tesis, Universitas Gadjah Mada).
- Wahyuni, D., & Kurniawan, B. (2022). Dana transfer dan belanja modal di era otonomi daerah. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*.
- Wahyuni, D., & Pryo, S. (2009). Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*.
- Yuliana, R., & Riduwan. (2023). Pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pemerintah kota di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Daerah*.